

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2022**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengklasifikasian daftar informasi publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022, yang meliputi:
- a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  - c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan setiap Unit Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Agustus 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

SHAHANDRA HANITIYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TANGGAL : Agustus 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) TAHUN 2022

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
Inspektorat	1	<b>Perencanaan:</b>									
		a. Hasil pelaksanaan dan kegiatan program Inspektorat	√	-	-	Laporan Kegiatan Inspektorat	Inspektur	Dibuat setiap tahun;LKPP	softcopy	3 tahun aktif, 4 tahun inaktif	1. Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan LKPP No 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		b. Rencana Strategis Inspektorat	√	-	-	Rencana strategis beserta targetnya		Awal RPJMN;LKPP	softcopy	5 Tahun aktif, 10 tahun inaktif	1. Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan LKPP No 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Keputusan Inspektur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024
	c. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat	√	-	-	Rencana Kegiatan Inspektorat selama tahun berjalan	Januari tahun berjalan;LKPP		softcopy	2 Tahun aktif, 3 tahun inaktif	Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
	2	Piagam audit Inspektorat	-	-	√	Kewenangan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan dan audit		Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP	softcopy	selama berlaku, 2 tahun inaktif	Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	3	Pedoman Pengawasan	-	-	√	Pedoman kegiatan Pengawasan Inspektorat LKPP		Dibuat setiap tahun;LKPP	softcopy	Selama berlaku, 3 tahun inaktif	1. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	1	Program Pelatihan Pengadaan Barang Jasa	-	-	√	1. Program Pelatihan Kompetensi 2. Program Pelatihan Teknis	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy; Website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	2	Tata Cara Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ	-	-	√	Uraian tentang tata cara pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy; Website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	3	Tata cara pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJ	-	-	√	Uraian tentang cara penilaian kesesuaian penyelenggaraan pelatihan PBJ terhadap pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ		Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP	Softcopy, Website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	4	Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	-	-	√	Uraian tentang tata cara penyelenggaraan pelatihan PBJ, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Perpres No.16 tahun 2018 tentang PBJP.		Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP	Softcopy, Website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	5	Tata cara pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	-	-	√	Uraian tentang tata cara penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa		Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP	Softcopy; Website ppsdm.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Keputusan Deputi III Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
	6	Materi Pelatihan	-	-	√	Materi Pelatihan dari Program Pelatihan Fungsional dan Teknis		Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP	softcopy	Sampai ada pembaruan, 5 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
	7	Portal Pengembangan dan Pembinaan Sumber daya Manusia pengadaang Barang jasa (PPSDM)	-	-	√	1. Data Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (LPPBJ) 2. Data Fasilitator PBJ 3. Jadwal Pelatihan 4. Daftar Nama Pengajar yang memiliki Sertifikat Training of Trainer 5. Data Program Pelatihan 6. Berita mengenai kegiatan Pusdiklat 7. e-learning		Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP	Softcopy; Website ppsdm.lkpp.go.id	Sampai ada pembaruan, 2 tahun inaktif	PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
<b>Biro Perencanaan dan Keuangan</b>	1	<b>Perencanaan:</b>					Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan				
		Rencana Strategis LKPP	√	-	-	Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Kinerja dan Anggaran		Awal RPJMN; LKPP	Hardcopy, Softcopy	10 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan LKPP</li> <li>Peraturan LKPP No.10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019</li> <li>Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Sekretaris Utama Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Deputi II Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Deputi III Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Deputi IV Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengguh LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Inspektur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Pusdiklat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Kepala LKPP Nomor 176 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LKPP Tahun 2020-2024</li> </ol>
		Rencana Kerja (RENJA) LKPP	√	-	-	Rencana Output dan Anggaran		Bulan Januari-April; LKPP	Hardcopy, Softcopy	5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga</li> <li>Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja LKPP Tahun 2021</li> <li>Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga</li> </ol>
		Dokumen Ringkasan DIPA LKPP	√	-	-	Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran		Bulan Desember; LKPP	Hardcopy, Softcopy	5 tahun	Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
		Laporan Kinerja (LKj) LKPP	√	-	-	Penjelasan Capaian Kinerja LKPP		Bulan April tahun berjalan; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		Laporan Kinerja (LKj) SESTAMA	√	-	-	Penjelasan Capaian Kinerja Sestama		Februari tahun berjalan; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif		
		Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)	√	-	-	Penjelasan mengenai kontrak kinerja selama satu tahun anggaran		Februari tahun berjalan; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 3 tahun inaktif		
		Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran)	√	-	-	Data dan/atau informasi capaian fisik dan keuangan		Bulanan, triwulanan, dan semesteran; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 1 tahun inaktif		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
		Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (sampai dengan tahun 2021)	√	-	-	Data dan/atau informasi terkait dengan tingkat kepuasan pengguna layanan publik LKPP		Triwulan 4; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		Laporan Survei Kepuasan Pegawai	√	-	-	Penjelasan mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan internal LKPP		Triwulan 4; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif		Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Laporan Nota Keuangan	√	-	-	Penjelasan mengenai capaian kinerja tahun berjalan dan usulan rencana kinerja/anggaran tahun yang akan datang		Bulan Juli tahun berjalan; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
		Lampiran Pidato Presiden	√	-	-	Penjelasan mengenai bahan dan lampiran pidato presiden ke DPR dan DPD yang berisi strategi dan laporan kinerja LKPP		Bulan Juli tahun berjalan; LKPP	Softcopy	2 tahun aktif, 4 tahun inaktif		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
	2	<b>Keuangan:</b>										
		Laporan Keuangan Tahunan LKPP (audited)	√	-	-	1. Terdiri dari: Pernyataan telah direview 2. Pernyataan Tanggung Jawab 3. Laporan Realisasi Anggaran 4. Neraca 5. Catatan Atas Laporan Keuangan 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 7. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan 8. Laporan realisasi Anggaran Belanja 9. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja 10. Neraca Percobaan	Semesteran dan tahunan pada tahun anggaran berjalan; LKPP	Hardcopy, Softcopy	2 tahun aktif, 10 tahun inaktif	1. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan LKPP No.11 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
<b>Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia</b>	1	Peraturan LKPP	-	-	√	Naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok mengenai kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LKPP.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	5 Tahun danpermanen	1. Pasal 11 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP beserta perubahannya 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.	

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	2	Keputusan	-	-	√	<p>a. Naskah dinas yang memuat: pengaturan terkait suatu kebijakan dibidang Pengadaan Barang/Jasa maupun bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit organisasi diLKPP; dan/atau</p> <p>b. kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/material/peristiwa atau menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan Menetapkan pelimpahan wewenang.</p>		Softcopy pada jdih.lkpp.go.id		4. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip LKPP.e. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP.	
	3	Surat Edaran	-	-	√	<p>Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak yang terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut:</p> <p>a. berskala Nasional yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden;</p> <p>b. berskala internal dan berlaku di LKPP sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama; dan</p> <p>c. berskala eksternal untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Lembaga atau berdasarkan tugas dan fungsi Kedeputian di LKPP.</p>		Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	2 Tahun dan permanen/dini lai kembali		
	4	Perjanjian Kerjasama	-	-	√	<p>Naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara LKPP dengan Pihak Kedua untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama baik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP yang bersifat teknis operasional.</p>		Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	5 Tahun dan permanen		
	5	Nota Kesepahaman	-	-	√	<p>Naskah dinas kesepakatan/ Pernyataan antara LKPP dengan Pihak Kedua yang memuat secara prinsip kedua belah pihak sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu baik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP yang bersifat teknis operasional.</p>		Softcopy pada jdih.lkpp.go.id			



Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	6	Standard Operational Procedure (SOP)	-	-	√	SOP di lingkungan LKPP	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada: a. jdih.lkpp.go.id b. rb.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 234 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	7	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi LKPP	-	-	√	Penjelasan mengenai program, kegiatan, hasil yang diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP		Lima tahun sekali, mengikuti periode Renstra; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024
	8	Peta Proses Bisnis LKPP	-	-	√	Peta Proses Bisnis level Lembaga, Level 0 dan Level 1		2021; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	9	Standar Pelayanan LKPP	-	-	√	Standar Pelayanan di Lingkungan LKPP		Tahun Berjalan; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 181 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	10	Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di LKPP	-	-	√	Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan LKPP		2019; LKPP	Softcopy pada jdih.lkpp.go.id	10 tahun dan bisa diperpanjang	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	11	Daftar Nama, jabatan dan pangkat pegawai	-	-	√	Informasi mengenai data pegawai (nama dan jabatan)		Tahun berjalan;LKPP	Hardcopy dan Softcopy	selama masih berlaku, 2 tahun inaktif	1. Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	12	Rekrutmen Pegawai di Lingkungan LKPP	-	-	√	Informasi mengenai rekrutmen pegawai pada posisi yang lowong di LKPP		2021;LKPP	softcopy pada Website www.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 2 tahun inaktif	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	1	Website dan media sosial LKPP	-	-	√	Informasi mengenai Badan Publik dan Kegiatan Badan Publik	Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy pada www.lkpp.go.id	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9	
	2	Informasi tentang Badan Publik	-	-	√	Informasi mengenai Profil Badan Publik berisi visi, misi, tupoksi, struktur organisasi dan nama pejabat		Softcopy pada www.lkpp.go.id	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9	
	3	Informasi tentang PPID LKPP	-	-	√	Informasi mengenai Profil PPID LKPP berisi visi, misi, tupoksi, struktur organisasi dan maklumat pelayanan		Softcopy pada ppid.lkpp.go.id	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22	
	4	Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LKPP	-	-	√	Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Pengajuan Sengketa Informasi Publik di LKPP		Softcopy pada ppid.lkpp.go.id	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22	
	5	Daftar informasi publik yang dikuasai LKPP	-	-	√	Informasi mengenai daftar informasi publik yang dikuasai Unit Kerja Eselon 2 di LKPP	Tahun Berjalan;LKPP	Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11	
	6	Produk hukum PPID LKPP	-	-	√	Informasi mengenai produk Hukum yang dikeluarkan oleh PPID LKPP		jdih.lkpp.go.id	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9	
	7	Pelaksanaan kegiatan Badan Publik	√	-	-	Informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Publik yang sudah fix dilaksanakan		Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9	
	8	Publikasi kegiatan Badan Publik	-	-	√	Informasi mengenai bahan-bahan publikasi seperti Majalah, dan Jurnal Pengadaan		Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9	
	9	Laporan PPID	√	-	-	Laporan mengenai jumlah permohonan layanan informasi publik		Hardcopy dan Softcopy	2 tahun	UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9	
	10	User Guide Aplikasi Sistem Informasi Persuratan LKPP	-	-	√	Cara menggunakan aplikasi sistem informasi persuratan LKPP bagi pengguna diluar pegawai LKPP		Softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	11	Permasalahan pada jaringan dan aplikasi LKPP yang terkait dengan ketersediaan sistem (availability)	-	√	-	Informasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam jaringan LKPP dan aplikasi LKPP,yang disebabkan oleh gangguan jaringan maupun pemeliharaan jaringan (terkait dengan ketersediaan sistem)		Dibuat per kasus laporan; LKPP	Softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	12	Data Koleksi perpustakaan	-	-	√	Jumlah koleksi dan Deskripsi data koleksi perpustakaan yang terdiri dari judul, nama pengarang, tahun dan kota terbit.		Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy pada perpustakaan.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	13	Daftar Hibah Buku	-	-	√	Daftar Koleksi Buku yang dihibahkan dari anggota perpustakaan		Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy berupa format manual yang dibuat oleh Pustakawan.	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	14	Dokumen RFC 2350 LKPP-Computer Security Incident Response Team(CSIRT)	-	-	√	Informasi mengenai kontak LKPP-CSIRT, prosedur kontak, dan tim LKPP-CSIRT		Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy pada web csirt.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	Keputusan Kepala LKPP No. 84 Tahun 2021, tentang LKPP Computer Security Incident Response Team
	15	Laporan Barang Milik Negara Tahunan LKPP (audited)	√	-	-	1. Terdiri dari: Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara 2. Laporan Posisi BMN di Neraca 3. Laporan Barang Persediaan 4. Laporan BMN Intrakomptabel 5. Laporan BMN Ekstrakomptabel 6. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 7. Laporan BMN Barang Bersejarah 8. Laporan BMN Aset Tak berwujud 9. Laporan BMN Konstruksi Dalam Pengerjaan 10. Laporan BMN BPYBDS (Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya) 11. Laporan Penyusutan Intrakomptabel 12. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel 13. Laporan Penyusutan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 14. Laporan Kondisi Barang 15. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak		Semesteran dan Tahunan pada tahun berjalan;LKPP	Hardcopy dan Softcopy	2 tahun aktif, 10 tahun inaktif	1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 2. PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN 3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	16	Daftar Arsip Inaktif	√	-	-	informasi mengenai rincian arsip inaktif yang disimpan		Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy	Selama Masih berlaku	1. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
	17	SOP Persuratan	√	-	-	Terdiri dari: 1. Penaanganan Surat Masuk 2. Surat masuk satu pintu		Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy	Selama Masih berlaku	2. Peraturan LKPP No 11 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di LKPP

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	18	SOP Kearsipan	√	-	-	Terdiri dari: 1. Penyimpanan Arsip Inaktif 2. Peminjaman Arsip Inaktif 3. Pengembalian Arsip Inaktif 4. Perpanjangan Peminjaman arsip inaktif Pendataan perlindungan dan penyimpanan arsip vital 5. Alih Media 6. Monitoring kearsipan 7. Peminjaman Arsip 8. Pemusnahan Arsip 9. Penyerahan Arsip 10. Pemeliharaan Kebersihan Tempat Arsip 11. Pemberkasan Arsip Aktif 12. Peminjaman Arsip Aktif 13. Pengembalian Arsip Aktif 14. Pendataan perlindungan dan penyimpanan arsip vital		Tahun Berjalan;LKPP	Softcopy	Selama Masih berlaku	Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	1	Ringkasan Kajian pendukung peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	-	-	√	Informasi yang menggambarkan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian di bidang pbjp	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Setiap kali ada penyusunan; LKPP	Hardcopy dan softcopy	1 tahun setelah tidak berlaku (aktif), 3 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP
	2	Daftar Inventaris Masalah (DIM) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	-	-	√	Informasi yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah		Setiap kali ada penyusunan; LKPP	Softcopy	Selama peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, 3 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP
	3	Informasi hasil Diseminasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	-	-	√	Informasi berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi Pengadaan Barang/Jasa yang sudah dilaksanakan		2020; LKPP	Softcopy	Selama berlaku	Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP
	4	Informasi pada situs SIPRAJA	-	-	√	Informasi berkaitan kumpulan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tanya jawab, dan materi diseminasi yang dipublikasikan pada situs SIPRAJA		Setiap kali publikasi; LKPP	Website	Selama berlaku	Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus	1	Aplikasi TEMANKU	-	-	√	Sistem Layanan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus, meliputi: 1. KPBU 2. BLU/BLUD 3. Desa 4. BUMN/BUMD 5. Badan Hukum Publik	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus	Tahun Berjalan	Website	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	2	Kajian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	-	-	√	Hasil kajian manajemen kontrak KPBU mengenai perbandingan pelaksanaan manajemen kontrak menurut beberapa pedoman dari beberapa negara di dunia dengan peraturan yang ada di Indonesia saat ini		2020; LKPP	Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	3	Kajian Badan Usaha dan Keadaan Khusus	-	-	√	Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa di Desa edisi Desember 2019 memuat contoh-contoh dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.		2019 dan 2021; LKPP	Hardcopy dan Softcopy	1 tahun aktif, 5 tahun inaktif	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	1	Kajian Iklim Usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	-	-	√	Kajian pengembangan iklim usaha nasional dalam perluasan kesempatan usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Bidang Konstruksi	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2015;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Sustainable Public Procurement Startegi membangun Awareness Sustainable Public procurement (SPP) bagi Pemerintah dan Skema Insentif Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam produksi Barang/Jasa yang Berkelanjutan		2015;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Pengembangan Iklim Usaha Sektor Kapal tangkap Skala Kecil Dalam perluasan Kesempatan Usaha dibidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah		2016;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Pengembangan Iklim Usaha Benih Padi Dalam perluasan Kesempatan Usaha di bidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah		2016; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan PBJP terhadap Kinerja Sektor Konstruksi dan Value for Money dalam Penyediaan Infrastruktur Publik		2016; LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			√	-	-	Laporan Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Bulan Desember tahun berjalan;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Peta Jalan Pengembangan Sustainable Public Procurement di Indonesia		2017;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			√	-	-	Laporan Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Bulan Desember tahun berjalan;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Kajian Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Sustainable Public Procurement (SPP)		2018;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Laporan Kegiatan Kesiapan Penyedia Barang/Jasa dan Dampak Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) Terhadap Penyediaan Barang/Jasa Yang Memenuhi Aspek Berkelanjutan		2018;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional		Kajian Iklim Usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	-	-	√	Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsolidasi Pengadaan Terhadap Iklim Usaha UMKM dalam PBJP	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2018;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Laporan Akhir Kajian Pemetaan Komoditas Barang dari Penyedia Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2018;LKPP	Hardcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			-	-	√	Laporan Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar dan Strategis		2019;LKPP	Hardcopy, softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
			-	-	√	Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2019;LKPP	Hardcopy, softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Fasilitasi 3 (Tiga) Produk Hijau atau Hasil Industri Hijau untuk Digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2019;LKPP	Hardcopy, softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2020;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
					√	Kajian Penggunaan Kriteria Lingkungan, Sosial dan Ekonomi pada Pengadaan Berkelanjutan dalam Kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2020;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
					√	Kajian Pemetaan Stakeholder Engagement untuk Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2021;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Pemetaan Persepsi Pelaku Pengadaan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan		2021;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	2	Kajian Persiapan Negosiasi Kerjasama Perdagangan Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	-	-	√	Kajian Posisi Indonesia dalam kerjasama Perdagangan Internasional		2015;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Kesiapan Penyedia Dalam Negeri dalam kerangka Kerjasama Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2017;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar PBJP dalam GPA WTO, IEU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri		2018;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Kesiapan Penyedia Barang/Jasa Indonesia dalam Kerjasama Bilateral Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA)		2018;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Dampak Ekonomi Liberalisasi PBJP dalam Kerangka IEU-CEPA Terhadap Industri Domestik		2018;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Daya Saing dan Dampak Ekonomi dalam Kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)		2019;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
			-	-	√	Kajian Pemetaan Procurement Guidelines Donor dalam rangka Kegiatan Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional		2020;LKPP	Softcopy	5 tahun (aktif), 5 tahun (inaktif)	Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	3	Aplikasi			√							

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
		Aplikasi Business Information and Supplier platform (BISA) Pengadaan	-	-	√	-Website untuk membangun e-portofolio Pelaku Usaha dalam rangka mempromosikan Usaha -Website untuk memudahkan masyarakat untuk melihat dan memahami menciptakan peluang Usaha dalam berpartisipasi dalam PBJP -Website yang memberikan informasi terkini tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2021 dan setiap ada pengembangan;LKPP	Website	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	1	Sistem Monitoring Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (SismonTEPRA)	-	-	√	Sistem pelaporan perencanaan penganggaran dan realisasi keuangan Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Tahun berjalan;LKPP	Aplikasi: <a href="http://monev.lkpp.go.id">monev.lkpp.go.id</a>	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah 3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja LKPP 4. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan 5. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha PBJP
	2	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	-	-	√	Sistem informasi untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaksanakan oleh K/L/Pemda			Aplikasi: <a href="http://sirup.lkpp.go.id">sirup.lkpp.go.id</a>	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	3	Aplikasi Daftar Hitam Nasional	-	-	√	Sistem Informasi yang memuat identitas penyedia barang/jasayang dikenakan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA K/L/Pemda		Tahun berjalan;LKPP	Aplikasi: <a href="http://inaproc.id/daftar-hitam">inaproc.id/daftar-hitam</a>	2 Tahun setelah diperbaharui (aktif), 5 tahun (inaktif)	
	4	Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL)	-	-	√	Sistem Informasi yang menampilkan rekapitulasi tahapan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak dan serah terima hingga pembayaran		Tahun berjalan;LKPP	Aplikasi pada setiap LPSE di masing2 K/L/Pemda. Misal: <a href="http://lpse.lkpp.go.id/eproc4/amel/">lpse.lkpp.go.id/eproc4/amel/</a>	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	5	Aplikasi Monitoring Evaluasi New Generation (MonevNG)	-	-	√	Sistem Informasi yang menampilkan rekapitulasi pengadaan barang/jasa secara Nasional (Keseluruhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah)		Tahun berjalan;LKPP	Aplikasi: <a href="http://monevng.lkpp.go.id">monevng.lkpp.go.id</a>	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	6	Flipbook Laporan Kinerja Pengadaan Nasional	√	-	-	Sistem Informasi yang menampilkan Rapor Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional maupun masing-masing Keseluruhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah		Tahun berjalan;LKPP	Aplikasi: <a href="http://monev.lkpp.go.id/flipbook">monev.lkpp.go.id/flipbook</a> & <a href="http://monev.lkpp.go.id/flipbookkpd">monev.lkpp.go.id/flipbookkpd</a>	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	1	Konten Katalog Elektronik	-	-	√	Jenis Komoditas, nama penyedia, merek/tipe dan spesifikasi harga barang/jasa yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Tahun berjalan;LKPP	Konten Penayangan Aplikasi e-katalog.lkpp.go.id	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan LKPP No.11 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	2	Informasi mengenai petunjuk penggunaan E-purchasing dan Katalog Elektronik	-	-	√	Tata cara dan prosedur pembelian barang/jasa (E-purchasing), proses pra katalog dan proses pembaruan data produk/penyedia yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik		Tahun berjalan;LKPP	softcopy	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	3	Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Katalog Elektronik	-	-	√	Undangan penawaran dan dokumen pengadaan barang/jasa		Tahun berjalan;LKPP	softcopy	selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	
	1	Informasi mengenai sebaran LPSE di seluruh Indonesia	-	-	√	Sistem informasi yang memuat identitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia.		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website <a href="https://eproc.lkpp.go.id/lpse/">https://eproc.lkpp.go.id/lpse/</a>	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	PerLKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
	2	Informasi mengenai petunjuk penggunaan Aplikasi SPSE	-	-	√	Sistem informasi yang memuat tata cara penggunaan SPSE sebagai Admin PPE, Admin Agency, PPK, Kepala Unit Pengelola PBJ, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia, Verifikator, Helpdesk, dan Auditor.		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website <a href="http://inaproc.id/">http://inaproc.id/</a>	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	PerLKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	3	Status Implementasi LPSE	-	-	√	Sistem Informasi yang memuat data K/L/PD yang telah memiliki LPSE dan telah melakukan Tender/Non Tender	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website <a href="https://inaproc.lkpp.go.id/agregasi/repository">https://inaproc.lkpp.go.id/agregasi/repository</a>	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	PerLKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan PerLKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
	4	Informasi mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-	-	√	Berisi informasi mengenai pengertian sistem pengadaan secara elektronik (Tender/Seleksi, Non Tender, e-Purchasing, e-Kontrak, e-Audit, dll)		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	PerLKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan PerLKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
	5	Data Pengadaan Nasional	-	-	√	Portal Pusat Pengadaan Nasional yang digunakan untuk menayangkan: - Data Tender; - Produk di e-Katalog; - Informasi Rencana Umum Pengadaan; - Sebaran LPSE; - Daftar Hitam; - Daftar Unduhan (Petunjuk Penggunaan, Peraturan/Regulasi, Aplikasi, SDP, dll); - Berita; - Daftar Tautan ke Aplikasi yang ada di LKPP; dan - Akses untuk SSO user di setiap LPSE ke Aplikasi e-Procurement Lainnya (SiRUP, e-Katalog, SIKaP, LPSE Support, Portal eProc, Bela Pengadaan, Probitry Advise, dll)		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website <a href="http://inaproc.id/">http://inaproc.id/</a>	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	6	Sosial Media Direktorat Pengembangan SPSE	-	-	√	Sosial media yang dikelola Direktorat Pengembangan SPSE		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Youtube: EPROC LKPP	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	7	Informasi permasalahan pada Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukung SPSE serta perawatan infrastruktur	-	√	-	Informasi mengenai <i>error</i> yang terjadi dalam pengadaan melalui SPSE, baik itu berhubungan dengan ADP ataupun dengan masalah jaringan diinformasikan melalui surat elektronik atau surat resmi		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Softcopy	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 2. PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	8	Portal eProc	-	-	√	Portal LPSE yang digunakan untuk menayangkan: - Sebaran dan Informasi LPSE; - Berita; - Agenda dan Pendaftaran Kegiatan/Pelatihan; - Daftar Unduhan; - Galeri Kegiatan; - Forum LPSE; - Daftar FAQ; - Survey; dan - Tautan Aplikasi.		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website <a href="https://eproc.lkpp.go.id/">https://eproc.lkpp.go.id/</a>	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	9	Informasi tentang Toko Daring	-	-	√	Data Rekapitulasi Transaksi Toko Daring dan Rekapitulasi Data Mitra		Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP	Website <a href="https://tokodaring.lkpp.go.id/">https://tokodaring.lkpp.go.id/</a>	Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)	1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. PerLKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
	1	Profil Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	√			Informasi yang memuat mengenai profil dan tugas fungsi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan		Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Website LKPP (lkpp.go.id) dan Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)		1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang LKPP beserta perubahannya 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	2	Program dan Layanan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	√			Informasi yang memuat mengenai program dan layanan yang ada di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan		Website Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)		1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang LKPP beserta perubahannya 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
	3	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang SKJ JFPPBJ	-	-	√	Standar Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah diterbitkan pada PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang SKJ JFPPBJ	Penyusunan dilakukan pada tahun 2018-2019; LKPP	softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017	
	4	Informasi mengenai sebaran status, dan jumlah UKPBJ di seluruh Indonesia	-	-	√	Uraian tentang sebaran, status & jumlah keberadaan UKPBJ di seluruh Indonesia	2018-2019 di LKPP	Softcopy / Website siukpbj.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Kematangan UKPBJ	
	5	Informasi Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Penggunaan Aplikasi SIMKU (siukpbj.lkpp.go.id)	-	-	√	Hasil kajian LKPP yang berisi tentang cara pengukuran kematangan UKPBJ di K/L/Pemda	2018-2019 ;LKPP	softcopy / Website siukpbj.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021; 3. Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Kematangan UKPBJ	
	6	Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa				Informasi yang memuat mengenai ketentuan dan pedoman pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)		Website LKPP (lkpp.go.id) dan Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)		1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS;	
	7	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			√	Pedoman yang memuat mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi JF PPBJ di KLPemda	2016;LKPP	Softcopy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;	
	8	Keputusan Deputi PPSDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain	-	-	√	Pedoman yang memuat mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan dalam JF PPEBJ melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain, yang meliputi persyaratan peserta, proses uji kompetensi, dan pengangkatan dalam JF PPBJ	2021;LKPP	Website LKPP (lkpp.go.id)	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	9	Keputusan Deputi PPSDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	-	√	Pedoman yang memuat mengenai tata cara penggunaan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (SIRENAKSI PPBJ)	2021;LKPP	Website LKPP (lkpp.go.id)	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 3. Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	10	Sistem Informasi Perpindahan Dari Jabatan Lain	-	-	√	Aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran dan uji kompetensi pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain	2021;LKPP	perpindahan.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 3. Keputusan Deputi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain	
	11	Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (SIRENAKSI PPBJ)	-	-	√	Aplikasi yang digunakan untuk menyusun rencana aksi dan melaporkan pemenuhan bukti dukung dalam rangka melaksanakan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ	2021;LKPP	sirenaksi.lkpp.go.id	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 3. Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;	



Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
										4. Keputusan Deputi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	12	Sistem Informasi Penghitungan dan Penilaian AK JF PPBJ				Aplikasi yang digunakan untuk menyusun perolehan AK dan menilai perolehan AK JF PPBJ		2015;LKPP	Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
	13	Keterisian JF PPBJ di KLPemda				Informasi yang memuat mengenai tingkat keterisian JF PPBJ di KLPemda		2020;LKPP	Portal PPSDM LKPP (ppsdm.lkpp.go.id)	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi
	14	Dokumen Analisa Jabatan JF PPBJ	-	-	√	Informasi yang memuat mengenai uraian masing-masing jenjang jabatan JF PPBJ yang meliputi tugas, hasil kerja, dan persyaratan jabatan		2020;LKPP	soft copy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 3. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
	15	Dokumen Informasi Faktor Jabatan JF PPBJ	-	-	√	Informasi yang memuat mengenai penjelasan atas 9 informasi faktor jabatan dalam rangka menentukan kelas jabatan (job grading) setiap jenjang JF PPBJ		2020;LKPP	soft copy	selama masih berlaku, 5 tahun inaktif	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 3. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
Direktorat Sertifikasi Profesi	1	Jadwal Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	√	Berisi informasi jadwal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaksanakan LKPP maupun permintaan Instansi		Berubah setiap ada perubahan; Website ppsdm.lkpp.go.id	softcopy	di Website: 2 Tahun setelah penyelenggaraan, 3 tahun inaktif	
	2	Daftar Peserta Lulus Uji Kompetensi	-	-	√	Berisi informasi terkait kelulusan Peserta Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; Website ppsdm.lkpp.go.id	softcopy	di Website: 2 Tahun setelah penyelenggaraan, 3 tahun inaktif	
	3	Daftar Pemilik Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	√	Berisi informasi terkait kepemilikan Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktur Sertifikasi Profesi	Berubah setiap ada perubahan; Website sertifikasipbj.lkpp.go.id	softcopy	selama berlaku	
	4	Daftar Pemilik Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	√	Berisi informasi terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; Google Drive	softcopy	selama berlaku	
	5	Data/Status Pengiriman Sertifikat Kompetensi	-	-	√	Berisi informasi terkait pengiriman Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; Website ppsdm.lkpp.go.id	softcopy	di Website: 2 Tahun setelah penyelenggaraan, 3 tahun inaktif	
	6	Kontak Direktorat Sertifikasi	-	-	√	Berisi informasi terkait data alamat dan layanan konsultasi Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Berubah setiap ada perubahan; Website ppsdm.lkpp.go.id	softcopy	selama berlaku	

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	7	Pelaksana Uji Kompetensi	-	-	√	Berisi informasi terkait Tempat Uji Kompetensi		Setiap ada penambahan; <i>Website</i> lkpp.go.id	<i>softcopy</i>	2 Tahun setelah diperbarui, 1 Tahun inaktif	
	8	Skema Kompetensi	-	-	√	Berisi informasi terkait paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.		Berubah setiap ada perubahan; <i>Website</i> ppsdm.lkpp.go.id	<i>softcopy</i>	2 Tahun setelah diperbarui, 1 Tahun inaktif	
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	1	Informasi layanan bimbingan teknis/Sosialisasi/Loka karya	-	-	√	Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi: 1. Jadwal Pelaksanaan 2. Mekanisme Penyelenggaraan 3. Kuota Peserta 4. Sumber Pembiayaan	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Tahun berjalan;LKPP	<i>softcopy</i> yang dapat diunduh <a href="http://www.lkpp.go.id">www.lkpp.go.id</a> dan hukum-sanggah.lkpp.go.id	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	2	Informasi mengenai Procurement Knowledge Management System	-	-	√	Informasi seputar pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		Tahun berjalan;LKPP	infografis, video, materi paparan dan tanya jawab pada <i>Website</i> pkms.lkpp.go.id dan aplikasi PKMS	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	1. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya, 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	1	Informasi mengenai pemberian Rekomendasi Advokasi dan Sanggahan, Pengaduan, <i>Probitiy Advice</i> dan <i>clearing House</i>	-	-	√	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	Tahun berjalan;LKPP	<i>softcopy</i>	selama berlaku;5 Tahun inaktif	1. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya, 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	2	Kumpulan Tanya Jawab terkait permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum/sifatnya tidak dikecualikan	-	-	√	pertanyaan dan jawaban pada portal konsultasi terkait permasalahan pra kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah		Tahun berjalan;LKPP	<i>softcopy</i>	selama berlaku;5 Tahun inaktif	
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	1	Bimbingan teknis, Seminar dan Loka Karya	√	-	-	Informasi berkaitan dengan laporan kegiatan Bimbingan teknis, Seminar dan Loka Karya yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	1. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di LKPP
	2	Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli	√	-	-	Informasi berkaitan dengan laporan kegiatan peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	3	Statistik Hasil Seleksi Keterangan Ahli	√	-	-	Rekapitulasi jumlah pemberi keterangan Ahli yang memenuhi kriteria		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	4	Statistik Rekomendasi Surat	√	-	-	Informasi berkaitan dengan jumlah rekomendasi surat yang diberikan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	5	Statistik Data Konsultasi	-	-	√	Informasi berisi statistik kategori pertanyaan dan profil pihak yang mengajukan pertanyaan		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	6	Statistik Pemberian Keterangan Ahli	√	-	-	Rekapitulasi jumlah pemberian layanan keterangan ahli		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	7	Statistik kasus whistleblowing system	-	-	√	Rekapitulasi jumlah laporan kasus		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	
	8	Statistik Pengaduan yang diajukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah di portal e-pengaduan	-	-	√	Rekapitulasi jumlah Pengaduan dari masyarakat/penyedia barang/jasa atas pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	

Unit Organisasi	No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan
			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
	9	Permohonan terhadap layanan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di portal Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	-	-	√	Permohonan atas layanan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah		Tahun Berjalan; LKPP	<i>softcopy</i>	1 tahun aktif, 2 tahun inaktif	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

SHAHANDRA HANITYYO